
PEMULIHAN EKONOMI INDONESIA PASCA REFORMASI 1998-2008

Liana D. Sumendap¹, Aksilas Dasfordate², Max L. Tamon
Jurusan Pendidikan Sejarah, FIS, Universitas Negeri Manado

Email: lsumendap83@gmail.com, aksilasdastfordate@unima.ac.id, maxtamon@unima.ac.id

Article History

Received :2022-05-12 Accepted :2022-05-18 Published : 2022-06-30

Abstrak- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa sampai terjadi Reformasi di Indonesia pada tahun 1998, serta bagaimana keadaan ekonomi pada masa reformasi dari tahun 1998-2008. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sejarah (*Historical Method*) yang digunakan untuk menguji dan menganalisa hasil penginggalan sejarah, dan menggunakan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data serta menganalisis data menggunakan analisis historis. Dalam penelitian ini ditemukan fakta bahwa Reformasi terjadi karena adanya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme pada masa orde baru. Pada masa awal reformasi era Bachruddin Jusuf Habibie, beliau melakukan re-alignment di bidang ekonomi, sosial dan politik. Abdurrahman Wahid mengambil langkah dengan keberpihakannya kepada rakyat kecil serta para pegawai. Megawati Soekarno Putri berhasil menurunkan inflasi, suku bunga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta menguatkan rupiah. Susilo Bambang Yudhoyono berhasil meningkatkan perekonomian secara umum, mengendalikan inflasi, meningkatnya permintaan agrerat domestik, dan mengurangi impor. Jadi setiap Presiden dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia menggunakan upaya yang masing – masing memiliki khas sendiri.

Kata kunci: *Reformasi, Perekonomian, Indonesia*

INDONESIAN ECONOMIC RECOVERY POST REFORM 1998-2008

Liana D. Sumendap¹, Aksilas Dasfordate², Max L. Tamon
Jurusan Pendidikan Sejarah, FIS, Universitas Negeri Manado

Email: lsumendap83@gmail.com, aksilasdastfordate@unima.ac.id, maxtamon@unima.ac.id

Abstract- This study aims to find out why the Reformation occurred in Indonesia in 1998, as well as how the economic conditions during the reformation period from 1998-2008 were. This study uses historical research methods (*Historical Method*). Where in this study found the fact that the Reformation occurred because of Corruption, Collusion, and Nepotism in the New Order era. During the early period of reform in the era of Bachruddin Jusuf Habibie, he carried out re-alignment in the economic, social and political fields. Abdurrahman Wahid took steps to take sides with the small people and the employees. Megawati Soekarno Putri succeeded in reducing inflation, interest rates, increasing economic growth, and strengthening the rupiah. Susilo Bambang Yudhoyono has succeeded in improving the economy in general, controlling inflation, increasing domestic aggregate demand, and reducing imports. So every President in improving the economy in Indonesia uses efforts that each have their own characteristics

Keywords: *Reform, Economy, Indonesia*

Pendahuluan

Ekonomi dalam banyak literatur disebutkan berasal dari bahasa Yunani yaitu kata *oikos* dan *oiku* dan *noimos* yang berarti peraturan rumah tangga. Jadi Ekonomi juga dapat diartikan dengan hal-hal yang menyangkut kehidupan rumah tangga, tentu saja yang dimaksud bukan hanya merujuk pada satu keluarga namun merujuk pada rumah tangga yang lebih luas yaitu bangsa, negara, bahkan dunia (Putong, 2010)

Perekonomian memiliki dampak penting bagi setiap orang bahkan negara demi kelangsungan hidup setiap masyarakat. Indonesia dulunya adalah Negara yang memiliki sumber daya alam melimpah, namun sejak bangsa-bangsa Eropa masuk ke Indonesia hidup bangsa Indonesia menjadi sengsara. Akan tetapi pada zaman kolonial di Indonesia, saat itu kita sudah bisa mengenal perekonomian yang dimana masyarakat sudah bisa mengenal uang dan cara bertani yang benar.

Sejak berdirinya orde baru dari tahun 1966-1998, terjadi krisis keuangan pada pertengahan tahun 1997 yang berkembang menjadi krisis ekonomi yang besar (Djiwandono 2001) terbukti dengan turunnya nilai tukar rupiah yang mencapai nilai paling buruk yaitu 17.000/USD, kerusuhan pada 13-15 Mei 1998 terjadi dikarenakan krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti dimana empat mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998. (Fathimah et al., n.d.) Pengunduran presiden Soeharto dari presiden terjadi karena adanya tuntutan akan reformasi yang terus meningkat ditambah dengan semakin memburuknya masalah perekonomian dan kerusuhan massal yang terjadi diberbagai tempat telah memporakporandakan benteng terakhir rezim yang telah berkuasa selama 32 Tahun tersebut (Ricklefs 2008).

Akhirnya presiden Soeharto mengambil keputusan turun dari jabatannya sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998 dan pada masa orde baru berakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada angka -13.13%. Saat Soeharto mengundurkan

diri, beliau diganti oleh wakil presidennya sendiri yaitu Bachruddin Jusuf Habibie yang diangkat menjadi Presiden ketiga Indonesia berdasarkan pasal 8 UUD 1945. Setelah pergantian pemimpin, Indonesia kemudian masuk ke babak baru atau masa reformasi, dengan berbagai kebijakan moneter yang dilakukan oleh Habibie dalam rangka pemulihan perekonomian Indonesia, contohnya pengesahan UU yang mendorong efisiensi kegiatan ekonomi yang dilakukan Habibie (Weda 1999).

Masa pemerintahan Bachruddin Jusuf Habibie merupakan masa yang sangat singkat dibandingkan dengan presiden Indonesia sebelumnya (Iskandar, 2016). Meski menjabat sebagai Presiden Indonesia dengan waktu yang paling singkat, B.J Habibie mengeluarkan banyak kebijakan pada masa pemerintahannya, seperti pengendalian beredarnya mata uang asing dan reformasi ekonomi, serta penerapan upaya pemulihan jangka panjang dan jangka pendek (Weda 2017:78), yang membuat kondisi kritis ekonomi pada masa itu mulai mengalami peningkatan. Dari sinilah Habibie mulai menunjukkan perubahan bagi Indonesia. Ada juga upaya yang dilakukan oleh Habibie dalam menghadapi krisis ekonomi yang ada salah satunya dengan menguatkan sektor perbankan (Makka 1995).

Masa pemerintahan Bachruddin Jusuf Habibie (21 Mei 1998-20 Oktober 1999) terjadi peningkatan drastis di bidang perekonomian Indonesia, semua kebijakan serta program yang dijalankan oleh Habibie berjalan cukup baik semua itu juga berkat adanya pinjaman diberikan oleh *International Monetary Fund* untuk Indonesia sehingga nilai tukar rupiah meningkat yang tadinya berada pada Rp 17.000/USD menjadi Rp 7.000/USD. Pertumbuhan ekonomi tampak menunjukkan perbaikan dari yang sebelumnya -13.13% menjadi 0.79%, angka inflasi pun sukses diturunkan dari 77,6% menjadi 2% dan angka kemiskinan dari 49,50 juta orang (24,20%) data ini diambil dari data Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia, 2006

Selanjutnya, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terpilih sebagai Presiden pada

tanggal 20 Oktober 1999 - 23 Juli 2001 setelah terpilih dalam Pemilu 1999. Padahal seharusnya Pemilu dilakukan pada Tahun 2002 akan tetapi karena adanya tuntutan reformasi, akhirnya Pemilu dipercepat menjadi Tahun 1999 serta pertanggung jawaban Bachruddin Jusuf Habibie ditolak dalam sidang umum MPR 1999 sehingga masa jabatannya hanya 1 Tahun.

Saat Gusdur menjabat sebagai presiden, Ada dua masalah utama pada implementasi program reformasi (Boediono 2002). *Pertama* hal yang berkaitan dengan reformasi struktural. *Kedua*, kapasitas pemerintah untuk mengimplementasikan program cenderung terbatas. Meskipun begitu pada, pemulihan ekonomi pada masa pemerintahan Gus Dur mengalami peningkatan dan mulai membaik. Seperti laju pertumbuhan PDB (nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi negara) mulai positif, pertumbuhan ekonomi berada pada angka 3.64% dari sebelumnya 0.79%, dan banyak kemiskinan menurun

Setelah Gus Dur mundur dari jabatannya, Ia kemudian digantikan oleh Megawati Soekarnoputri.. Dalam buku Megawati Presidential Political Policy in 2001 – 2004 dikatakan bahwa pemulihan ekonomi masa reformasi Megawati, Ia lebih berfokus pada perbaikan sektor perbankan dan ekonomi masyarakat umum agar membantu perekonomian Indonesia agar bertumbuh serta mencegah inflasi yang semakin naik pesat. Atas upaya yang dilakukan megawati dalam menurunkan inflasi, beliau mampu membuat ekonomi berada pada angka 5.03%. dan pada 20 Oktober 2004 Megawati digantikan oleh Presiden selanjutnya yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Pada masa pemerintahan SBY pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca reformasi naik-turun tetapi pertumbuhan ekonomi masih dalam angka yang relatif stabil. Di awal pemerintahannya pertumbuhan ekonomi menjadi 5.69%, kemudian pada tahun 2006 pertumbuhan Indonesia sedikit melambat dan turun menjadi 5.5%, pada tahun berikutnya naik lagi menjadi 6.35%, Pada akhir tahun 2008 pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun menjadi 6.01%. dari masa pemerintahan sejak awal reformasi sampai pada reformasi tahun 2008, perekonomian

Indonesia selalu mengalami peningkatan di setiap pemerintahan yang ada.

Penelitian ini dimulai sejak 1998 dimana terjadinya badai krisis ekonomi di Asia yang berdampak juga bagi Indonesia serta kerusuhan disertai aksi demo diberbagai daerah dan sampai tahun 2008 dimana terjadi krisis ekonomi di negara Amerika Serikat, jadi krisis ekonomi pada tahun 1998 dan 2008 cukup mirip.

Dari Latar Belakang Masalah yang telah dibahas, yang jadi perumusan masalah adalah:

1. Mengapa terjadinya reformasi di Indonesia?
2. Bagaimana pemulihan Ekonomi Indoneia selama 10 tahun pasca reformasi tahun 1998-2008?

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui proses terjadinya reformasi di Indonesia 1998?
2. Mengetahui keadaan ekonomi di Indonesia pada tahun 1998-2008 pada masa reformasi

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis untuk dapat menambah pengetahuan serta wawasan tentang sejarah, khususnya tentang pemulihan ekonomi Indonesia pasca reformasi pada tahun 1998-2008
2. Manfaat secara praktis
 - a) Bagi pembaca agar mengetahui mengenai pemulihan ekonomi indonesia pada masa refomasi.
 - b) Bagi peneliti agar dapat digunakan sebagai penerapan ilmu tentang sejarah yang dihadapi di masa lalu khususnya pemulihan ekonomi Indonesia masa reformasi, serta menambah wawasan pengetahuan tentang masa lampau.

Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian sejarah (Historical Method). Metode penelitian sejarah adalah proses menguji dan menganalisa dengan baik peninggalan sejarah masa lampau (Gottschalk 1985:32). Untuk mengumpulkan data yang relevan dalam

penelitian ini, maka penulis menggunakan studi pustaka. Teknik studi pustaka adalah suatu cara mengumpulkan data dan mempelajari data dari literatur yang dianggap relevan (Subana 2005). Analisis data yang dipakai merupakan teknik analisis historis. Menurut Kuntowijoyo dalam Dudung Abdurrahman (1999:64) Interpretasi disebut juga dengan analisis Sejarah. Analisis artinya merangkaikan, sedangkan sintesis artinya menyatukan. Analisis dan Sintesis merupakan hal yang utama dalam interpretasi.

Hasil dan Pembahasan

Strategi Serta Upaya Pemerintah Pada Masa Reformasi Indonesia (1998-2008)

Indonesia Sebelum Reformasi 1998

Ada beberapa penyebab yang membuat kekuasaan Orde Baru dibawah pemerintahan Soeharto runtuh, yang setelah itu menjadi masa Reformasi antara lain: krisis keamanan, krisis sosial budaya, krisis politik, serta krisis ekonomi yang ada. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 bermula dari Thailand yang akhirnya membuat nilai tukar rupiah menurun terhadap dollar AS. Nilai tukar rupiah yang mengalami penurunan mengakibatkan mahalnya harga bahan pokok di pasar, angka pengangguran bertambah, banyaknya PHK, dan naiknya tindak kriminalitas dalam masyarakat. Beberapa penyebab pokok Presiden Soeharto lengser dari jabatannya sebagai presiden adalah sebagai berikut:

Krisis Moneter di Indonesia Tahun 1997

Krisis ini terjadi di negara Thailand pada awal Juli 1997 yang menjadi permulaan masalah yang membuat nilai tukar mata uang negara-negara di Asia seperti Malaysia, Filipina, dan juga Indonesia menurun.

Anjloknya nilai mata uang rupiah yang terjadi di bulan Oktober 1997 berada pada angka Rp4.000 /US \$, pada bulan Januari 1998 rupiah terus menurun hingga ke level sekitar Rp 17.000 US \$ (Poesponegoro dan Notosusanto, 2009:665). Dalam mengatasi krisis ekonomi ini hampir semua sektor publik mengeluarkan berbagai macam kebijakan seperti, Cinta Indonesia (Genta),

Gerakan Cinta Rupiah (Gentar), Gerakan Cinta Reksa Dana Gerakan Nasional, Gerakan Cinta Pasar Modal, dan kebijakan Menteri Keuangan Mar'ie Mohammad yang mencantumkan harga dalam denominasi rupiah sebagai dasar transaksi di wilayah Indonesia. (Sahdan, 2004:255-258).

Pemerintah RI sejak Oktober 1997 meminta bantuan terhadap *International Monetary Fund* Karena gejolak US\$ terhadap Rupiah yang meningkat (Sahdan, 2004:259-260).

Situasi dan Kondisi Sosial Politik Indonesia

Pada bidang politik pemerintahan yang mengatur segala kekuasaan terhadap lembaga legislatif (MPR/DPR), ABRI, dan partai politik utamanya Golkar. Masyarakat menganggap jika Soeharto membiarkan demokrasi dan kebebasan dalam memberikan pendapat yang melanggar Hak Asasi Manusia. Pers dibatasi oleh Presiden Soeharto, berkaitan dengan kebijakan pemerintahan Orde Baru. Buku-buku pun tidak bisa diterbitkan jika tidak sama dengan kebijakan pemerintah. Pada saat itu, Pemerintah mengatur segala pergerakan dan mencegah aspirasi masyarakat yang kontra kepada pemerintah.

Situasi Kondisi Keamanan di Indonesia

Pada saat Krisis ekonomi tahun 1997 mengakibatkan perubahan terhadap keamanan bangsa Indonesia, Alhasil terjadi protes dari rakyat agar dilakukan pergantian pemerintah agar bisa mengatasi dan memperbaiki krisis yang ada. Kekhawatiran inilah yang membuat masyarakat banyak menjadi kriminalitas dengan melakukan aksi perampasan di Ibukota terhadap etnis china yang memiliki banyak harta benda.

Pada saat itu bahkan anggota keamanan tidak bisat berbuat banyak saat para demonstran aksi merapa terhadap orang-orang Cina. Anggota keamanan yang diberi tanggung jawab untuk menjaga pusat distribusi Indofood Jakarta malah melenceng dari tugasnya dimana mereka malah membantu demonstran untuk merampas barang-barang (Anderson, 1998:22-24).

Situasi Kondisi Sosial Budaya

Krisis yang terjadi di Indonesia berdampak negatif terhadap seluruh sektor korporasi, yang didalamnya ada sektor perbankan yang juga membuat kebutuhan pokok naik serta inflasi yang meningkat. Situasi yang ada di Indonesia baik dari sosial budaya sangat meresahkan sejak mulai runtuhnya pemerintahan Soeharto yang didasari oleh krisis politik dan krisis ekonomi.

Pada akhir tahun 1996 dan awal tahun 1997 terjadi kekacauan yang sangat parah pada daerah Kalimantan Barat dimana suku Dayak dan Melayu melakukan pembunuhan terhadap kaum pendatang Madura. Ada sumber yang mengatakan bahwa kekacauan tersebut mengakibatkan terdapat lebih dari seribu orang meninggal, bahkan suku Dayak terus melakukan pembunuhan juga memenggal kepala korban mereka (Ricklefs, 2005:645).

Gerakan Mahasiswa Tahun 1998

Pada akhir Februari 1998, gerakan mahasiswa mulai muncul. Kekecewaan masyarakat karena harga kebutuhan pokok yang melonjak drastis, serta ancaman putus sekolah dan masa depan yang kacau bagi sebagian besar mahasiswa, menjadi motor penggerak organisasi-organisasi tempat mahasiswa dan civitas akademika berjuang pemerintah (Sumitro, No Tahun:9).

Pemulihan Ekonomi Indonesia Masa Awal Reformasi (1998-1999)

Bachruddin Jusuf Habibie mengemukakan dalam bukunya bahwa ia dilantik menjadi Presiden Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998 tepatnya pukul 09.05 setelah Soeharto menyatakan berhenti sebagai Presiden RI, dimana dalam pidatonya Soeharto mengaku berhenti atas keputusan sendiri, dengan merujuk pasal 8 UUD 1945 yang berbunyi *"jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh wakil presiden sampai habis batas waktunya"* dan tak lama kemudian Habibie resmi dilantik sebagai presiden RI. Habibie berdiri di panggung politik dengan berbagai macam persoalan politik, ekonomi, dan sosial budaya yang harus dipecahkan dan dilewatinya dalam 17 bulan masa pemerintahan (Habibie 2010:237-

241). Saat baru menjabat sebagai Presiden, Habibie sudah harus menghadapi permasalahan ekonomi yang ada di Indonesia.

Keapresidenan Presiden Indonesia Bachruddin Jusuf Habibie tidak bertahan lama. Hal ini disebabkan munculnya ketidaksenangan masyarakat terhadap pemerintah pasca tumbanganya Orde Baru, terutama mengingat parahnya krisis ekonomi. Inilah tantangan berat bagi Presiden Habibie untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada, bahkan ada yang menyamakan posisinya dengan gunung berapi yang sewaktu-waktu akan meletus jika berbagai persoalan politik, sosial, ekonomi, dan psikologis dari pemerintahan sebelumnya tidak ditanggulangi. langsung.

Habibie mulai melakukan modifikasi dan pembenahan di berbagai bidang, meski perkembangannya tidak terlalu bagus, di saat situasi sedang kacau balau. Menurut (Zuhdi 2012:652), Habibie berhasil menurunkan nilai tukar rupiah dari Rp 17.000 menjadi Rp 6.000 per dolar AS, membebaskan Bank Indonesia dari kendali pemerintah dan mengubahnya menjadi entitas otonom. Meskipun sejauh mana peningkatan ekonomi selama pemerintahan Habibie tidak diketahui, semua upaya harus diperhitungkan dalam konteks sejarah Indonesia.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (1999-2001)

Dari sisi perekonomian, kondisi perekonomian Indonesia mulai membaik pada tahun 1999 dibandingkan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDB telah membaik, namun masih di bawah 0%, dan proses pemulihan ekonomi Indonesia semakin membaik pada tahun 2000, dengan laju pertumbuhan sekitar 5%. Selain pertumbuhan PDB, tingkat inflasi dan suku bunga jangka pendek (SBI) juga rendah, mengindikasikan kondisi moneter domestik mulai stabil.

Keadaan Ekonomi Indonesia Setelah proses Pemulihan dan Pertumbuhan (2001-2004)

Setelah Gus Dur turun dari jabatannya, Megawati Soekarnoputri pun dilantik untuk menggantikan Gusdur. Megawati merupakan Presiden wanita pertama bagi negara Indonesia. Pada masa pemerintahan

Megawati, beliau dinilai berani dalam mengambil keputusan-keputusan besar salah satunya adalah mengakhiri program reformasi kerjasama dengan *International Monetary Fund* pada bulan Desember tahun 2003 dan dilanjutkan dengan privatisasi perusahaan negara dan divestasi bank guna menutup defisit anggaran negara. Megawati mengambil keputusan dengan mengakhiri kerjasama dengan *International Monetary Fund* karena menurut pendapat Megawati beserta jajaran pemerintahannya bahwa Semua opsi yang ditawarkan *International Monetary Fund* sifatnya 'mencekik leher' atau mengekang bagi Indonesia dimana *International Monetary Fund* dianggap membuat Indonesia supaya terus bergantung pada *International Monetary Fund*.

Megawati mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Pasca Berakhirnya Program Dana Moneter Internasional untuk menjamin stabilitas makroekonomi setelah penghentian kerjasama dengan IMF. Kebijakan tersebut memiliki beberapa poin penting. Reformasi kebijakan perpajakan, efisiensi belanja pemerintah, dan privatisasi BUMN, misalnya, semuanya berperan di sektor fiskal. Jaring Pengaman Sektor Keuangan, yang mendivestasikan bank dari BPPN, memperbaiki struktur tata kelola bank-bank pemerintah, dan mereformasi sektor pasar modal, asuransi, dan dana pensiun, dirancang di sektor keuangan. Kajian juga dilakukan di industri investasi.

Keadaan Ekonomi Indonesia setelah Pemulihan dan Pertumbuhan periode pertama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (2004-2008)

Program pertama pemerintahan SBY dikenal dengan program 100 hari, program ini bertujuan untuk memperbaiki sistem ekonomi yang sangat memberatkan rakyat Indonesia, memperbaiki kinerja pemerintah dari unsur KKN, serta mewujudkan keadilan dan demokratisasi melalui kepolisian dan Kejaksaan Agung (Nugroho 2010:32). Tujuan utama pemerintahan SBY di bidang ekonomi adalah menjadikan Indonesia negara yang lebih kaya, yang meliputi langkah-langkah untuk meningkatkan iklim investasi,

meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan, dan memastikan stabilitas makro. Untuk mencapai tujuan utama yang telah ditetapkan, Presiden SBY mengelola pemerintahannya dengan menetapkan visi dan misi di bidang ekonomi berdasarkan pendekatan

Kebijakan Pemerintahan Indonesia Pada Masa Reformasi 1998-2008

Kebijakan –kebijakan dalam masa pemerintahan B.J Habibie Program Restrukturisasi Perbankan

Pada awal pemerintahannya tahun 1998 Presiden B.J. Habibie harus berhadapan dengan situasi perbankan yang lemah. Karena ada bank bermasalah, maka perbankan tidak berperan sebagai intermediasi pergerakan dana. Presiden B.J. Habibie membubarkan 38 bank, menguasai tujuh bank lainnya, dan merekapitalisasi sembilan bank lainnya. Operasi ini diawasi langsung oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yang mengklasifikasikan lembaga-lembaga yang dilikuidasi (Gie, 1999:168). Pemerintah melalui BPPN mengarahkan penutupan bank agar tabungan konsumen tidak disalahgunakan dan bank yang ada dapat dipercaya.

Pelaksanaan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS)

Kekeringan disertai dengan krisis ekonomi yang semakin parah di berbagai daerah di Indonesia. Pada tahun 1998, jumlah orang yang tergolong miskin telah meningkat menjadi 100 juta. Habibie berada di bawah banyak tekanan. Oleh karena itu, pemerintah melakukan upaya untuk melaksanakan program bantuan langsung di bidang sosial budaya sesuai dengan TAP MPR NO. X / MPR/1998, yang bertujuan untuk memitigasi dampak krisis ekonomi (Habibie, 2006:381). Sektor kesehatan dan pendidikan menjadi fokus dari inisiatif JPS. Di bidang kesehatan, Habibie memberikan dukungan operasional kepada sekitar 7.000 Puskesmas dan menggalang dana untuk proyek pemberdayaan masyarakat yang berdampak pada 36 ribu desa di seluruh Indonesia.

Selain itu, Habibie memberikan bantuan pangan tambahan kepada 8 juta anak Indonesia guna memenuhi kebutuhan gizinya (Habibie, 2006:381). Selama menempuh pendidikan, Habibie memberikan beasiswa kepada 4 juta anak muda yang hampir putus sekolah, serta bantuan operasional kepada 130 ribu sekolah di seluruh Indonesia (Mannin, dkk, 2000: 191). Diharapkan program bantuan langsung pemerintah pada akhirnya akan mengurangi dampak krisis terhadap masyarakat miskin.(Paulus et al., 2021)

Program Pemberdayaan Rakyat

Sektor bisnis terus memburuk hingga tahun 1998, meskipun terjadi perlambatan ekonomi makro yang dimulai pada pertengahan tahun 1997. Tujuan Presiden B.J. Habibie dalam mengembangkan sistem ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat adalah untuk memperkuat sistem ekonomi bagi rakyat. Akibatnya, masyarakat kelas kecil-menengah diperkirakan akan menjadi mayoritas (Pratiknya, 1999:39). Pemerintah juga meletakkan dasar bagi perekonomian yang lebih modern, mandiri, berdasarkan sumber daya manusia yang produktif, berdaya saing, dan berkualitas tinggi.

Kebijakan-kebijakan dalam masa pemerintahan Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid, sering dikenal sebagai Gus Dur, adalah presiden keempat Indonesia dan meninggalkan jejaknya di lanskap ekonomi negara. Tindakannya di bidang ini dianggap mampu menghidupkan kembali perekonomian negara yang sedang terpuruk.

Selama 21 bulan masa jabatannya, gaji pejabat sipil naik sebanyak 125 persen. Daya beli PNS tumbuh sebagai akibat dari kenaikan ini. Kenyataannya, sampai ekonomi membaik, 95 persen dari keseluruhan gaji dihabiskan. Gus Dur juga mengembangkan kebijakan untuk membebaskan petani dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dari pembayaran bunga utang. "Banyak petani dan pengusaha UMKM yang terkena imbas dari tingginya suku bunga pinjaman yang dipatok 80%.

Kebijakan – kebijakan dalam masa pemerintahan Megaawati Soekarno Putri

Pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, status ekonomi Indonesia membaik. Pada kenyataannya, ekonomi belum sepenuhnya pulih, dan pengangguran tetap tinggi; namun demikian, sejumlah indikator makroekonomi menunjukkan situasi yang membaik. Gejolak nilai tukar rupiah yang tidak terkendali, jumlah utang pemerintah, dan belum tuntasnya restrukturisasi perbankan nasional merupakan isu ekonomi utama yang dihadapi kabinet gotong royong sejak awal. Masalah tersebut berdampak pada tingkat pengangguran, serta tingkat pendapatan dan pembelian yang dilakukan oleh masyarakat. Dukungan infrastruktur terhambat oleh kurangnya ketertiban dan keamanan, serta ketidakpastian hukum, yang menurunkan hasil investasi. Oleh karena itu, Megawati mengambil langkah untuk meningkatkan peran intermediasi perbankan sekaligus menstabilkan perkembangan fiskal dan makroekonomi.

Tindakan ekonomi Megawati dipuji karena keberaniannya, seperti menghentikan program reformasi yang dipimpin IMF pada Desember 2003 dan kemudian dilanjutkan dengan privatisasi BUMN dan divestasi bank untuk mendanai defisit anggaran negara. "Bagi Indonesia, semua alternatif IMF adalah 'tersedak'. Mereka berpegang teguh pada Indonesia agar tetap bergantung pada IMF "Saat itu, Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional, serta Ketua Bappenas berkomentar (Kwik Kian Gie 2002:14).

Kebijakan – kebijakan dalam masa pemerintahan periode pertama (2004-2009) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

1. Penghematan energi secara total

SBY melakukan langkah-langkah untuk menghemat energi: *pertama*, menggunakan teknologi informasi untuk mengontrol sistem distribusi di setiap SPBU. Baik data kepemilikan maupun data fisik masing-masing mobil akan direkam secara elektronik. Langkah ini, menurut Presiden, dilakukan agar penggunaan bahan bakar, khususnya BBM bersubsidi, dapat dipantau secara transparan dan akuntabel, serta akurat penggunaannya. Selain itu, Pertamina akan terus menjaga pasokan sesuai dengan kuota regional sekaligus menyediakan bahan bakar

nonsubsidi apa pun yang dibutuhkan untuk menghindari kelangkaan bahan bakar.

Kedua; pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan pemerintah, baik pusat maupun daerah, juga untuk BUMN dan BUMD. Dengan demikian, jajaran pemerintah sekaligus memberikan contoh nyata dalam upaya penghematan BBM. Dilakukan dengan cara pemberian stiker khusus, bagi kendaraan yang dilarang menggunakan BBM bersubsidi tersebut

Ketiga; pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan perkebunan dan pertambangann yang diterapkan juga denan menereapkan sistem stiker. Sementara pengawasannya dilakukan oleh BPH migas bekerjasama dengan aparat penegak hukum dan pemda. Untuk memenuhi kebutuhan BBM bagi kalangan pertambangan dan perkebunan, Pertamina akan menambah SPBU BBM non subsidi sesuai kebutuhan dilokasi tersebut

Keempat, program utama nasional adalah konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas untuk transportasi guna mengurangi ketergantungan pada bahan bakar dan akhirnya beralih ke gas.

Kelima, penghematan penggunaan listrik dan air di kantor pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD, serta penghematan penerangan jalan yang akan dimulai pada Juni 2012.

RENUNGAN 10 TAHUN MASA REFORMASI

Bidang Ekonomi

Pada bidang Ekonomi selama Masa Reformasi 10 Tahun yang dimulai dari 1998-2008 dapat diambil garis besar bahwa untuk pertumbuhan Ekonomi Indonesia setiap pergantian pemerintahan selalu mengalami peningkatan. Dan untuk pembuktian dapat dilihat pada tabel dibawah ini yang diambil sumber pada data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia.

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi
1998	-13,1
1999	0,79

2000	4,92
2001	3,44
2002	3,66
2003	4,1
2004	5,1
2005	5,6
2006	5,5
2007	6,3
2008	6,1

Bidang Politik

Runtuhnya Pemerintahan Soeharto pada tahun 1998 mengantarkan pada masa transformasi politik yang substansial, salah satunya adalah pemulihan demokrasi dalam politik nasional. Pada tahun 1999, pemilihan LUBER sejati diadakan, dengan 48 partai politik berpartisipasi. Sistem presidensial, dikombinasikan dengan sistem multi-partai, merupakan respons terhadap pelajaran masa lalu. Solusinya tidak datang tanpa serangkaian masalahnya sendiri. Para ahli perbandingan politik seperti Scott Mainwaring atau Juan Linz dan Arturo Valensuela (Juan Linz and Arturo Valensuela, 1994, hal 6-8) mengatakan bahwa paling tidak ada 3 (tiga) kelemahan pokok sistem ini.

Pertama, ada risiko kelumpuhan atau kemacetan pemerintah akibat ketegangan antara eksekutif dan legislatif. Presiden dipilih langsung oleh rakyat maupun oleh DPR atau DPR, dimana masing-masing meyakini telah mendapatkan legitimasi dari rakyat (dual legitimacy). Kebuntuan politik dalam sistem yang berdasarkan trias-politica ini dapat mengakibatkan pemerintahan yang terpecah-pecah, dengan berbagai partai politik yang menguasai kursi kepresidenan dan DPR..

Kedua, kekakuan struktural yang melekat pada sistem presidensial sebagai akibat dari

masa jabatan eksekutif yang permanen, yang berarti tidak ada mekanisme untuk menggantikan presiden di tengah masa jabatannya jika kinerjanya tidak memuaskan publik.

Ketiga, premis intrinsik sistem presidensial “pemenang mengambil semua”, yang memungkinkan presiden untuk mengklaim pilihan kebijakan politiknya atas nama rakyat, berlawanan dengan lembaga legislatif (DPR) yang didominasi oleh kepentingan partisan partai politik.

Bidang Hukum

Ketika presiden Soeharto tumbang, masyarakat mulai menaruh harapan besar bahwa akan terjadi perubahan yang signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tiga kekuasaan akan berfungsi secara proporsional dan profesional sesuai dengan visi dan misinya masing – masing. Salah satu perubahan yang paling diharapkan adalah reformasi di bidang hukum khususnya penegakan hukum. Sebab, bidang hukum di era Presiden Soeharto praktis tidak berfungsi, khususnya dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Yang semestinya negara hukum berpedoman pada *the rule of law* tetapi yang terjadi adalah *the rule by law*. Dalam perjalanan reformasi selama 10 tahun memang ada yang mulai tampak keberhasilan, terutama dalam keseimbangan tiga eksekutif, yudikatif dan legislatif.

Simpulan

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Gerakan Reformasi muncul sebagai akibat dari tuntutan rakyat kepada pemerintah pada masa Orde Baru, di mana terjadi pelecehan dan perlakuan tidak adil. Ketidakadilan ini terjadi di berbagai profesi, termasuk politik, hukum, dan ekonomi, di mana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merajalela.

Alhasil selama masa reformasi pemerintahan mengalami peningkatan terutama dalam bidang Ekonomi dari tahun ke tahun dan pemerintahan awal Reformasi dimulai dari pemerintahan Bachrudin Jusuf Habibie, dimana Beliau mampu menekan dan mengatasi perekonomian Indonesia yang saat itu sudah anjlok akan tetapi sangat disayangkan karena pemerintahan Bachrudin Jusuf Habibie hanya berjalan tidak lama.

Namun setiap pergantian pemerintahan indeks pemulihan ekonomi Indonesia terus meningkat sampai pada masa pemerintahan SBY. (Badan Pusat Statistics Indonesia) pemerintahan dari Bachrudin Jusuf Habibie, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan Susilo Bambang Yudhiyono angka kemiskinan terus menurun dari 49,5 juta orang (24,20%) pada masa orde baru menjadi 38,74 juta orang (19,14%) pada masa awal reformasi, 37,87 juta orang (18,41%) pada periode kedua pasca reformasi, 36,15 juta orang (16,66%) pada periode ketiga pasca reformasi, dan 34,96 juta orang (15,42%) pada periode keempat pasca reformasi.

Pada masa Reformasi jalannya Politik berpengaruh juga dengan perkembangan Ekonomi Indonesia, walaupun pertumbuhan Ekonomi meningkat tetapi tidak meningkat secara signifikan dikarenakan banyak partai politik yang bersaing memperebutkan kekuasaan yang mulai dari pemilihan kepala negara, DPR, MPR, serta pemilihan serentak kepala daerah menguras anggaran belanja Negara saat pemilihan berjalan.

Dalam ranah hukum, pertumbuhan ekonomi juga berdampak, karena keduanya saling terkait. Dalam bidang ekonomi, hukum memiliki peran dan fungsi yang vital sebagai ketentuan normatif. Analisis ekonomi, ekonom politik, dan penguasa di masa orde baru melihat hukum sebagai penghambat pelaksanaan kegiatan ekonomi. Pada saat itu, hukum tidak digunakan sebagai landasan, pedoman, atau penegak kegiatan ekonomi; justru, keberadaan hukum dirusak oleh penguasa semata-mata untuk melindungi kepentingan politik dan ekonomi orde baru, dan baru setelah krisis moneter yang meluluhlantahkan perekonomian Indonesia barulah mereka menyadari pentingnya undang-undang tersebut. adanya undang-undang untuk mendorong iklim pertumbuhan ekonomi dan untuk menarik investasi.

Jadi Pertumbuhan perekonomian juga bergantung pada bidang hukum, untuk mengatur dan membatasi penguasa-penguasa politik yang bisa menyalahgunakan kekuasaan terutama pada bidang ekonomi untuk keuntungan diri sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung. 1999. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Amin, Muhammad Zuhdi. 2012. *Pengaruh tingkat inflasi, suku bunga SBI, nilai Kurs dollar AS (USD/IDR) Indeks Dow Jones (DJIA). Dan indeks harga saham gabungan (BEI)*.
- Anderson, B. dkk. 1998. *Soeharto Lengser Perspektif Luar Negeri*. Yogyakarta : LkiS
- Asma, Weda. 1999. *Statistik Indonesia tahun 1999*. Jakarta: Pustaka Belajar.
- Boediono. 2016. *Ekonomi Moneter (Lintasan Sejarah)*. Yogyakarta: BPFE Badan Pusat Statistik (BPS- Statistics Indonesia).
- Djiwandono, J Soedrajad. 2001. *Bergulat dengan krisis dan pemulihan ekonomi Indonesia*. Jakarta: Pustaka sinar harapan.
- Fathimah, S., Lubis, Y., Kerebungu, F., Rahman, E. Y., Rahman, R., Umaternate, A. R., & Mesra, R. (n.d.). *Handling the Conflict in District Heads Election Issues by the Pasaman Police*.
- Paulus, E., Lala, R., Greyne Kudampa, M., Sunarti, E., Chonstantinofel, R., Naflalia, G., & Rahman, Y. (2021). Peran Komunitas Kabasaran dalam Menjaga Identitas Minahasa di Tondano. In *Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan* (Vol. 8, Issue 2).
- Gie, K. K. 1999. *Gonjang-Ganjing Ekonomi Indonesia: Badai Belum Akan Segera Berlalu*.